

Perbandingan Implementasi E-Procurement Di Indonesia Dan Australia

Diwi Putri Gulo^{a,*}, Timbul Dompok^b, Etika Khairina^c

^{abc}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

*diwiputrig@gmail.com

Abstract

This research compares the implementation of e-procurement in Indonesia and Australia using a qualitative literature study method. Despite similar processes, there are differences in approach, system features, data security, transparency and accountability. Indonesia uses the SPSE one-stop system, while Australia uses a decentralized approach through AusTender. Both countries face challenges in e-procurement adoption such as change resistance, technological infrastructure, and complex system integration. Support programs and user training are key to effective implementation. Efforts to increase transparency and accountability continue despite concerns about limited information and lack of standardization of reporting. This research highlights best practices, challenges and collaboration potential for further e-procurement development.

Keywords E-Procurement Implementation; Indonesia; Australia

Abstrak

Penelitian ini membandingkan implementasi e-procurement di Indonesia dan Australia menggunakan metode studi literatur kualitatif. Meskipun memiliki proses yang serupa, terdapat perbedaan dalam pendekatan, fitur sistem, keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas. Indonesia menggunakan sistem satu pintu SPSE, sedangkan Australia menggunakan pendekatan terdesentralisasi melalui AusTender. Kedua negara menghadapi tantangan dalam adopsi e-procurement seperti resistensi perubahan, infrastruktur teknologi, dan integrasi sistem yang kompleks. Program pendukung dan pelatihan pengguna menjadi kunci untuk implementasi yang efektif. Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas terus dilakukan meski terdapat kekhawatiran tentang keterbatasan informasi dan kurangnya standarisasi pelaporan. Penelitian ini menyoroti praktik terbaik, tantangan, dan potensi kolaborasi untuk pengembangan e-procurement lebih lanjut.

Kata Kunci Implementasi E-Procurement; Indonesia; Australia

1. Pendahuluan

E-Procurement adalah proses pelelangan secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini merupakan bagian integral dari kegiatan pemerintah dan sektor swasta di seluruh dunia. Proses pengadaan yang efektif, terbuka, dan efisien menjadi kunci untuk memastikan penggunaan sumber daya yang tepat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. E-procurement telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2002 untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Penerapan e-procurement dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penayangan proses dan hasil lelang melalui internet. Tahapan selanjutnya adalah semi e-procurement, di mana sebagian pengadaan dilakukan secara online, sementara sebagian lainnya masih konvensional. Tahapan terakhir, full e-procurement, memungkinkan

proses pemilihan penyedia barang dan jasa secara digital melalui sistem e-procurement, sementara penjelasan dokumen lelang tetap dilakukan secara langsung. E-procurement membantu menghemat waktu dan tenaga, memangkas biaya operasional, serta meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan manusia dalam proses pengadaan. Selain negara Indonesia, negara Australia juga menjadi salah satu neegara yang memulai penggunaan e-procurement sejak tahun 1990. Mereka menggunakan e-procurement untuk menghemat anggaran dan memudahkan penyediaan barang dan jasa. Di awal pertengahan tahun 1990-an, pemerintah Australia mulai mendorong lembaga-lembaga untuk menyediakan layanan informasi secara online.

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, sistem e-procurement telah menjadi salah satu alat penting bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa. E-procurement mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan proses pengadaan secara elektronik, mulai dari pengumuman tender, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, hingga penunjukan pemenang. Dengan mengadopsi sistem e-procurement, pemerintah dapat mengurangi biaya dan waktu proses pengadaan, meningkatkan persaingan yang sehat di antara penyedia, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang telah mengimplementasikan sistem e-procurement dalam proses pengadaan mereka. Meskipun tujuan utama penerapan e-procurement adalah serupa, namun terdapat perbedaan dalam implementasi dan praktik yang dilakukan di kedua negara tersebut. Perbandingan implementasi e-procurement di kedua negara ini menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem tersebut dijalankan, serta tantangan dan keberhasilan yang dicapai dalam penerapannya.

Di Indonesia, sistem e-procurement yang digunakan adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SPSE telah menjadi sistem wajib bagi seluruh kementerian/lembaga/institusi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengadaan barang/jasa tertentu (LKPP, 2021). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan di Indonesia, serta mempromosikan persaingan yang sehat di antara penyedia. Dalam implementasinya, SPSE telah mengalami berbagai perkembangan. Salah satu perkembangan penting adalah penerapan sistem e-katalog yang memungkinkan pemerintah untuk mempublikasikan kebutuhan barang/jasa secara online dan memperoleh penawaran dari penyedia secara elektronik (Amin & Junaidi, 2021). Selain itu, LKPP juga telah meluncurkan fitur baru seperti e-purchasing dan e-monitoring untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan (LKPP, 2023). Sementara itu, di Australia, sistem e-procurement yang digunakan disebut AusTender, yang dikelola oleh Departemen Keuangan. Penggunaan AusTender wajib bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah federal serta beberapa organisasi lain yang ditunjuk (AusTender, 2023). Sistem ini bertujuan untuk menyediakan platform terpusat bagi pemerintah Australia dalam melakukan proses pengadaan secara

elektronik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. AusTender juga telah mengalami perkembangan signifikan, salah satu perkembangan penting adalah penerapan sistem e-tendering yang memungkinkan penyedia untuk menyampaikan penawaran secara elektronik dan memfasilitasi evaluasi penawaran secara online (AusTender, 2021). Selain itu, AusTender juga telah mengintegrasikan sistem manajemen kontrak dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kontrak pengadaan (Department of Finance, 2022). Dalam implementasinya, kedua sistem memiliki proses yang mirip, seperti pendaftaran penyedia, pengumuman tender, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, dan penunjukan pemenang. Namun, terdapat perbedaan dalam detail proses, alur kerja, dan fitur yang disediakan oleh masing-masing sistem. Selain itu, tingkat keamanan, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapan e-procurement di kedua negara juga dapat bervariasi tergantung pada implementasi teknis dan kebijakan yang ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam implementasi e-procurement adalah keamanan dan integritas data. Kedua sistem menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dan proses pengadaan, seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan jejak audit. Di Indonesia, LKPP telah memperkuat keamanan SPSE dengan menerapkan teknologi blockchain dan kriptografi untuk melindungi integritas data pengadaan (LKPP, 2022). Sementara di Australia, AusTender telah menerapkan keamanan tingkat tinggi dengan menggunakan enkripsi data dan autentikasi multi-faktor (AusTender, 2021). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tujuan utama dalam penerapan e-procurement di kedua negara. Sistem e-procurement diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh publik. Di Indonesia, LKPP telah meluncurkan portal transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pengadaan secara terbuka (LKPP, 2023). Sementara di Australia, AusTender telah menyediakan akses publik terhadap informasi tender dan kontrak, serta mempublikasikan laporan pengadaan secara rutin (AusTender, 2023). Dalam upaya mendukung implementasi e-procurement, Indonesia dan Australia juga memiliki program dukungan dan pelatihan bagi pengguna sistem, baik bagi penyedia maupun pengadaan. Di Indonesia, LKPP telah mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi pengguna SPSE untuk

meningkatkan kompetensi dan kepatuhan dalam menggunakan sistem (LKPP, 2021). Sementara di Australia, Departemen Keuangan telah menyediakan panduan, webinar, dan sumber daya online bagi pengguna AusTender untuk memfasilitasi adopsi dan penggunaan sistem yang efektif (Department of Finance, 2022). Dengan mempelajari praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik dari implementasi e-procurement di Indonesia dan Australia, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi perbaikan dan pengembangan sistem e-procurement di masa depan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat sistem e-procurement terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan di masing-masing negara..

2. Kajian Literatur

E-Procurement atau pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan proses pengadaan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Manfaatnya antara lain menghemat waktu dan biaya operasional, meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan manusia, mempromosikan persaingan sehat di antara penyedia, serta memfasilitasi pengawasan dan audit pengelolaan keuangan publik. Di Indonesia, sistem yang digunakan adalah SPSE dengan fitur e-katalog, e-purchasing, dan e-monitoring, sedangkan di Australia menggunakan AusTender dengan pendekatan terdesentralisasi. Keamanan data menjadi aspek penting, Indonesia menerapkan blockchain dan kriptografi (LKPP, 2022), sementara Australia menggunakan enkripsi dan autentikasi multi-faktor (AusTender, 2021). Transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan melalui akses publik terhadap informasi pengadaan. Tantangannya meliputi resistensi perubahan, infrastruktur teknologi, integrasi sistem kompleks, dan keamanan. Program dukungan dan pelatihan pengguna juga disediakan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk membandingkan implementasi e-procurement di Indonesia dan Australia. Data dikumpulkan melalui dokumen kebijakan, laporan resmi, jurnal ilmiah, publikasi internasional, dan sumber online kredibel. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema relevan seperti proses e-procurement, keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan dari

analisis diinterpretasikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua negara, dengan hasilnya dibahas dalam konteks teori dan penelitian sebelumnya. Meskipun metode ini tidak dapat menggeneralisasi temuan atau menentukan hubungan kausal, namun memberikan gambaran komprehensif tentang praktik e-procurement di kedua negara.

4. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Implementasi E-Procurement Di Indonesia Dan Australia

Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi persamaan dan perbedaan utama dalam implementasi e-procurement di Indonesia dan Australia secara mendalam, dengan berfokus pada beberapa aspek kunci seperti proses e-procurement, fitur sistem, keamanan data, transparansi, akuntabilitas, tantangan implementasi, dan dukungan pengguna.

Proses e-Procurement

Secara umum, kedua negara memiliki proses e-procurement yang relatif serupa, meliputi pendaftaran penyedia, pengumuman tender, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran, dan penunjukan pemenang. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam detail proses dan alur kerja.

Di Indonesia, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan sistem satu pintu (single portal) di mana seluruh proses pengadaan dilakukan melalui portal SPSE (Nurmayanti et al., 2021). Pendekatan ini memungkinkan standarisasi dan integrasi yang lebih baik dalam proses pengadaan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Sementara di Australia, AusTender menggunakan pendekatan terdesentralisasi, di mana setiap lembaga pemerintah memiliki sistem e-procurement sendiri yang terintegrasi dengan AusTender (Hawking et al., 2019). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga untuk mengustomisasi sistem mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik, namun juga dapat menyebabkan fragmentasi dan kurangnya standarisasi dalam proses pengadaan secara keseluruhan.

Fitur Sistem

Kedua sistem e-procurement terus berkembang dengan penambahan fitur baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan fungsionalitas.

Di Indonesia, SPSE telah mengintegrasikan fitur seperti e-katalog, yang memungkinkan pemerintah untuk mempublikasikan kebutuhan barang/jasa secara online dan memperoleh penawaran dari penyedia secara elektronik

(Sari & Rahmayati, 2019). Fitur ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan dan memperluas jangkauan penyedia potensial. Selain itu, SPSE juga telah meluncurkan fitur e-purchasing dan e-monitoring untuk memfasilitasi proses pembelian dan pemantauan pengadaan secara elektronik (LKPP, 2023).

Sementara di Australia, AusTender telah menerapkan sistem e-tendering yang memungkinkan penyedia untuk menyampaikan penawaran secara elektronik dan memfasilitasi evaluasi penawaran secara online (AusTender, 2021). Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam proses penyampaian dan evaluasi penawaran. Selain itu, AusTender juga telah mengintegrasikan dengan sistem manajemen kontrak dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kontrak pengadaan secara keseluruhan (Department of Finance, 2022).

Keamanan Data

Keamanan data menjadi aspek penting dalam implementasi e-procurement untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga integritas proses pengadaan. Kedua negara telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan data dalam sistem e-procurement mereka.

Indonesia telah menerapkan teknologi blockchain dan kriptografi untuk meningkatkan keamanan SPSE (LKPP, 2022). Blockchain digunakan untuk menjaga integritas data dengan menciptakan catatan digital yang tidak dapat diubah dan terdistribusi secara aman. Sementara kriptografi digunakan untuk mengenkripsi data dan melindungi kerahasiaan informasi sensitif dalam proses pengadaan. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem dan mencegah upaya manipulasi atau kecurangan.

Di sisi lain, Australia menggunakan enkripsi data dan autentikasi multi-faktor pada AusTender untuk melindungi keamanan data (AusTender, 2021). Enkripsi data memastikan bahwa informasi yang dikirimkan melalui sistem e-procurement terlindungi dari akses tidak sah, sedangkan autentikasi multi-faktor meningkatkan keamanan dengan memverifikasi identitas pengguna melalui beberapa faktor seperti kata sandi, token perangkat, atau biometrik.

Transparansi

Transparansi dalam proses pengadaan merupakan tujuan utama dalam implementasi e-procurement di kedua negara. Sistem e-procurement diharapkan dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh publik.

Di Indonesia, LKPP telah meluncurkan portal transparansi yang menyediakan akses publik terhadap informasi pengadaan (LKPP, 2023). Portal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses data tender, kontrak, dan laporan pengadaan secara terbuka. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi pengawasan publik terhadap proses pengadaan pemerintah.

Sementara di Australia, AusTender mempublikasikan informasi tender, kontrak, dan laporan pengadaan secara rutin melalui situs web mereka (AusTender, 2023). Selain itu, AusTender juga menyediakan akses terbatas kepada masyarakat umum untuk melihat detail tender tertentu, meskipun akses penuh hanya diberikan kepada penyedia yang terdaftar dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan.

Akuntabilitas

E-procurement juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di kedua negara. Dengan menyediakan jejak audit yang transparan dan mekanisme pelaporan yang ketat, sistem e-procurement dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.

Di Indonesia, SPSE dilengkapi dengan fitur audit trail yang memungkinkan pelacakan dan pemantauan proses pengadaan secara transparan (Nurmayanti et al., 2021). Fitur ini mencatat setiap tindakan dan perubahan yang dilakukan dalam proses pengadaan, sehingga memudahkan auditor untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kecurangan. Selain itu, LKPP juga mewajibkan lembaga pemerintah untuk melaporkan kegiatan pengadaan mereka secara berkala, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Di Australia, AusTender menyediakan mekanisme pelaporan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dalam proses pengadaan (Hawking et al., 2019). Lembaga pemerintah harus melaporkan kontrak yang diberikan melalui AusTender, termasuk detail seperti nilai kontrak, penyedia yang dipilih, dan alasan pemilihan. Selain itu, AusTender juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan oleh lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku.

Tantangan Implementasi

Di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari para pemangku kepentingan, khususnya penyedia barang/jasa yang belum terbiasa dengan

sistem e-procurement (Nurmayanti et al., 2021). Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam implementasi SPSE secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Rahim et al., 2019).

Sementara di Australia, tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas dalam mengintegrasikan sistem e-procurement di seluruh lembaga pemerintah yang terdesentralisasi (Hawking et al., 2019). Setiap lembaga memiliki sistem dan proses pengadaan yang berbeda, sehingga diperlukan upaya yang signifikan untuk menyeragamkan dan mengintegrasikan sistem tersebut dengan AusTender. Selain itu, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian utama dalam implementasi e-procurement di Australia (AusTender, 2021).

Dukungan Pengguna

Untuk memfasilitasi adopsi dan penggunaan sistem e-procurement yang efektif, kedua negara memiliki program dukungan dan pelatihan bagi pengguna, baik bagi penyedia maupun lembaga pemerintah. Di Indonesia, LKPP mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi pengguna SPSE untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan dalam menggunakan sistem (Nurmayanti et al., 2021). Program ini mencakup pelatihan teknis tentang pengoperasian SPSE, serta pelatihan terkait aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, LKPP juga menyediakan layanan dukungan teknis bagi pengguna SPSE untuk membantu mengatasi masalah yang mungkin timbul. Sementara di Australia, Departemen Keuangan menyediakan panduan, webinar, dan sumber daya online bagi pengguna AusTender untuk memfasilitasi adopsi dan penggunaan sistem yang efektif (Department of Finance, 2022). Departemen ini juga memberikan pelatihan khusus bagi lembaga pemerintah yang baru mengadopsi AusTender, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam proses implementasi. **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktik** Meskipun kedua negara berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan melalui e-procurement, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi praktiknya. Di Indonesia, meskipun SPSE telah meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses publik terhadap informasi pengadaan, namun terdapat kekhawatiran bahwa informasi yang disediakan masih terbatas dan kurang lengkap (Rahim et al., 2019). Selain itu, terdapat juga keraguan tentang efektivitas mekanisme pengawasan dan audit dalam mencegah kecurangan dalam proses pengadaan. Di

Australia, meskipun AusTender mempublikasikan informasi tender dan kontrak, namun akses publik yang terbatas dapat mengurangi transparansi dan partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan (Hawking et al., 2019). Selain itu, kurangnya standarisasi dalam pelaporan dan evaluasi pengadaan oleh lembaga pemerintah yang terdesentralisasi juga dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas secara keseluruhan. Dengan mempelajari praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan e-procurement di masa depan. Kolaborasi dan berbagi pengalaman antar negara dapat membantu mengidentifikasi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah..

5. Kesimpulan dan Saran

Indonesia dan Australia memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasi e-procurement. Indonesia menggunakan sistem satu pintu (SPSE) yang terintegrasi, sedangkan Australia menggunakan pendekatan terdesentralisasi melalui AusTender. Meskipun proses e-procurement secara umum serupa, terdapat perbedaan dalam detail proses, alur kerja, dan fitur sistem yang disediakan. Kedua negara terus mengembangkan fitur baru dalam sistem e-procurement mereka untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan fungsionalitas. Aspek keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fokus utama, dengan Indonesia menerapkan teknologi blockchain dan kriptografi, serta Australia menggunakan enkripsi data dan autentikasi multi-faktor. Dalam upaya meningkatkan transparansi, Indonesia telah meluncurkan portal transparansi yang menyediakan akses publik terhadap informasi pengadaan, sedangkan Australia mempublikasikan informasi tender, kontrak, dan laporan pengadaan secara rutin. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi praktiknya, seperti keterbatasan informasi dan kurangnya standarisasi dalam pelaporan dan evaluasi. Kedua negara juga menghadapi tantangan dalam implementasi e-procurement, seperti resistensi terhadap perubahan, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, kompleksitas integrasi sistem, dan masalah keamanan data. Untuk memfasilitasi adopsi dan penggunaan yang efektif, program dukungan dan pelatihan bagi pengguna disediakan, baik bagi penyedia maupun lembaga pemerintah. Meskipun masih terdapat tantangan, implementasi e-procurement di Indonesia dan Australia terus berkembang

dengan upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Kolaborasi dan berbagi pengalaman antara kedua negara dapat membantu mengidentifikasi solusi yang efektif untuk pengembangan e-procurement di masa depan.

Daftar Pustaka

- AusTender*. (2021). *AusTender Security and Authentication*.
- AusTender*. (2023). *About AusTender*.
- Brandon-Jones, A., & Carey, S. (2011). *The impact of user-perceived e-procurement quality on system and contract compliance*. *International Journal of Operations & Production Management*, 31(3), 274-296.
- Department of Finance. (2022). *AusTender User Guides and Resources*. Diakses dari <https://www.finance.gov.au/government/procurement/austender-user-guides-and-resources>
- Emery, T., & Mélon, L. (2023). *Does e-procurement matter for economic growth? Subnational evidence from Australia*. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 89, 318-334.
- Hawking, P., Stein, A., & Wyld, D. C. (2019). *E-procurement Ronchi*, S., Brun, A., Golini, R., & Fan, X. (2010). *What is the value of an IT e-procurement system?*. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 16(2), 131-140.
- Hayden, E., van Kan, D., Chan, M., Arowoiya, V., & Mohamed, M. (2023). *Chapter E-Procurement in the Australian Construction Industry: Benefits, Barriers, and Adoption*.
- Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2021). *Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa*. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1(2), 74-81.
- JASA, P. B. D. *IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DAN PENCEGAHAN FRAUD*.
- LKPP. (2021). *Panduan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)*.
- LKPP. (2022). *Penerapan Blockchain pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)*.
- LKPP. (2023). *Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)*.
- Lusine, M. E. H. R. A. B. Y. A. N. (2016). *Country case: Australian Government's procurement information system Description*.
- Nurmayanti, S., Putra, A. H. P. K., & Kurniawan, N. B. (2021). *Evaluasi penerapane-procurement pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintah Kota Semarang*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 18(2), 163-182.
- Pha, A. (2023). *The corporate state*. *Guardian (Sydney)*, (2059), 3-3.
- Purnawati, N. W., Arsana, I. N. A., Arfyanti, I., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, S., Prasetya, F. D., ... & Judijanto, L. (2024). *Sistem Informasi: Teori dan Implementasi Sistem Informasi di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sa'adah, N. (2020). *The implementation of E-procurement in Indonesia: Benefits, risks, and problems*. *INFERENS I: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(2), 283-304.
- Saraswati, L. M. (2023). *Evaluasi Penerapan Aplikasi Government Resource Management System (GRMS) Dalam Mencapai Good Governance Di Pemerintah Kota Surabaya*. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 321-332.
- Sari, N. P., & Rahmayati, A. (2019). *Analisis Penerapan E-Katalog dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Meningkatkan Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 107-118.
- Structural reformation of public procurement practices*. In *Digital Kenyan: An Entrepreneurial Revolution in the Making* (pp. 127-148). Palgrave Macmillan, Cham.
- Vaidya, K., Sajeew, A. S. M., & Callender, G. (2006). *Critical factors that influence e-procurement implementation success in the public sector*. *Journal of Public Procurement*, 6(1/2), 70-99.
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.